

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah telah ditetapkan di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan peraturan pemerintah (Shodiqun dalam Setiawan, 2012). Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Sabarno dalam Setiawan, 2012). Pendelegasian kewenangan tersebut

disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good government governance* (Shodiqun dalam Setiawan, 2012). Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik ditunjukkan dari laporan keuangan yang disusun dan telah diaudit. Suatu laporan keuangan haruslah memenuhi kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi yang juga tertuang dalam PP No. 71 tahun 2010 yang menjadi dasar hukum Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana kriteria tersebut meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem akuntansi, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Bastian, 2007).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam setiap organisasi tidak terkecuali pada organisasi pemerintah. Sumber daya manusia adalah pengelola dan pemikul tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Beberapa kelemahan yang masih terdapat dalam tata laksana keuangan pemerintah Provinsi Lampung yaitu: mulai dari pengelolaan keuangan di salah satu kabupaten masih buruk, keandalan sistem informasi keuangan daerah, kendali terhadap prosedur akuntansi dalam penatausahaan keuangan daerah, serta kelalaian dan ketidakcermatan para kepala-kepala biro keuangan bagian akuntansi dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga masih terdapat kendala dalam memperoleh laporan keuangan daerah yang sangat berkualitas.

Dalam memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan dapat

diperkuat juga dari opini BPK. Kualitas terbaik dari laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di dalam mencapai opini WTP, peran dari sumber daya manusia yang kompeten sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat, dan tentunya data yang dihasilkan harus akurat, maka di dalam hal ini diperlukan adanya dukungan sistem akuntansi dan teknologi.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Handayani (2007) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sedang antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan masih banyak kesulitan yang dialami dalam melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Pangesti (2008) bahwa unsur-unsur pokok dalam sistem akuntansi keuangan SKPD di Kabupaten Batang berada dalam keadaan yang sesuai yaitu pada variabel kesesuaian Buku Besar, Prosedur Akuntansi dan Jurnal secara berurutan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan. Namun variabel kesesuaian Struktur Organisasi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan.

Dalam penelitian Rahman (2009) hasilnya terbukti bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sedangkan pada penelitian Fajar (2010) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika sistem akuntansi keuangan daerah semakin membaik maka semakin membaiknya juga kualitas laporan keuangan, dan juga berlaku sebaliknya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adrianus Fajar (2010) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung”. Penelitian tersebut mengatakan terdapat pengaruh dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut merupakan studi kasus pada suatu kabupaten. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia serta perbedaan lain yang terletak pada objek yang diteliti dan penelitian ini merupakan studi empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas dan berpijak pada teori-teori yang ada, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Perumusan Masalah

Pada saat dimulainya otonomi daerah, harapan yang muncul adalah pemerintah daerah akan semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, daerah otonom diberi kebebasan yang bertanggung jawab dalam hal penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya dan penilaian prestasi kerja pemerintah daerah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, maka perangkat SKPD perlu memahami penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam laporan keuangan SKPD sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu, kualitas laporan keuangan juga harus memenuhi aturan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 pada lampiran II yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk dapat memperbaiki kinerja instansi dan mewujudkan *good governance* dibutuhkannya sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah ditemukan di atas terdapat beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka batasan masalah yang ditentukan oleh peneliti adalah:

- 1) Terdapat hanya tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Penelitian ini dilakukan pada beberapa pemerintah daerah yang dapat mewakili seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh bukti empiris bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Memperoleh bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik tentang bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada sektor pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna dan dijadikan informasi tambahan untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk dijadikan referensi serta masukan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja terutama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.